

## KAJIAN KONSTITUSIONAL INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS MAHKAMAH KONSTITUSI.

Malik

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang

### Abstrak

Kekuasaan kehakiman menjadi salah satu elemen terpenting dalam struktur ketatanegaraan suatu negara. Dalam konsep negara hukum, baik konsep *rechtstaat*, the rule of law, maupun *nomokrasi Islam*, kekuasaan kehakiman menjadi pilar penting tentang bagaimana negara hukum bekerja. Asumsinya, jika kinerja kekuasaan kehakiman buruk, maka akan berimplikasi bagi buruknya negara hukum Indonesia.

**Kata Kunci:** *Independensi, Akuntabilitas, Mahkamah Konstitusi*

### Abstract

*Judicial authority to be one of the most important element in the constitutional structure of a country. In the concept of law, whether the concept *rechtstaat*, the rule of law, nor *nomokrasi Islam*, justice becomes an important pillar of how state law works. The assumption was that if the poor performance of the judicial authorities, it will have significant implications for poor countries to Indonesian law.*

**Keywords:** *Independensi, Accountability, the Constitutional Court*

### PENDAHULUAN

*Christian Boulanger* (2002) menyebutkan adanya dua perkembangan penting yang menandai perubahan politik dan ketatanegaraan di seluruh dunia pada paruh kedua abad ke-20. Pertama, perkembangan yang sering diasosiasikan pada tesis *Francis Fukuyama* (1992) tentang hegemoni demokrasi liberal dan kapitalisme pasar serta tesis *Samuel P. Huntington* (1991, 2000) tentang gelombang demokratisasi ketiga. Perkembangan ini terutama terkait dengan runtuhnya rezim komunis di Eropah Timur yang menimbulkan gelombang demokratisasi baru.

Menurut studi *Larry Diamond* dan *Freedom House* sejak tahun 1990 hingga 1998 terjadi peningkatan lebih dari 60% negara yang mengalami proses demokratisasi yang disebut *Diamond* sebagai *electoral democracy* (*Diamond*, 2000). Kedua, perkembangan yang disebut sebagai “*Global Expansion of Judicial Review*” (*Tate dan Vallinder*, 1995) Di seluruh dunia, Mahkamah Konstitusi atau lembaga sejenis telah dibentuk dengan kekuasaan untuk menyatakan konstitusionalitas suatu tindakan eksekutif atau aturan hukum yang ditetapkan secara demokratis oleh lembaga legislatif.